

LAPORAN

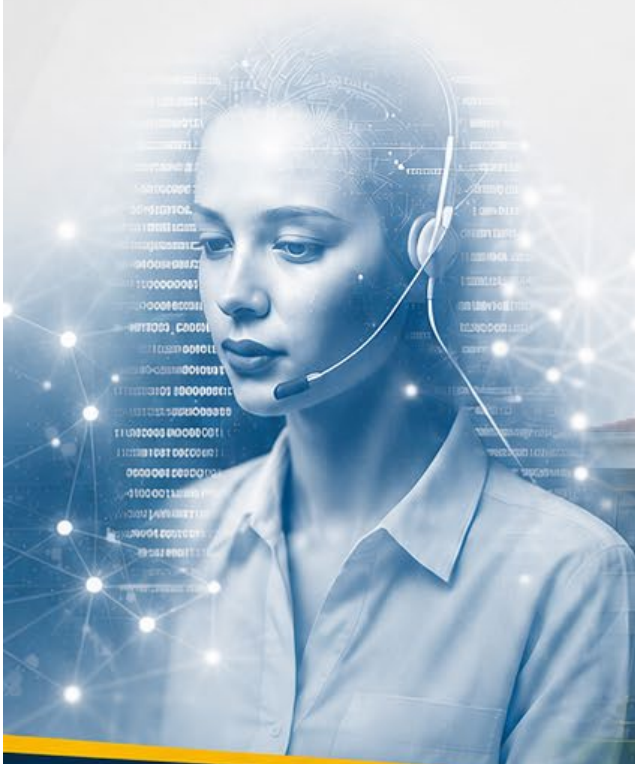


PENYUSUNAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PERIODE TRIWULAN II

TAHUN 2026



Pengadilan Agama Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta



Telp. 0274 - 552997



Website:
www.pa-yogyakarta.go.id



Email:
admin@pa-yogyakarta.net

DAFTAR ISI

BAB I	1
KUESIONER SURVEI	1
1.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN SURVEI.....	1
1.2. KETENTUAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	2
1.3. INDIKATOR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	2
BAB II	4
METODOLOGI SURVEI	4
2.1. KRITERIA RESPONDEN.....	4
2.2. METODOLOGI PENYUSUNAN SURVEY	4
2.3. METODOLOGI PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS	5
BAB III	7
PENGOLAHAN SURVEI	7
3.1. ANALISIS HASIL SURVEI	7
3.2. KESIMPULAN HASIL SURVEY.....	9
3.3. OPINI RESPONDEN	9
3.4.TINDAKLANJUT HASIL SURVEI	10
BAB IV	11
DATA SURVEI	11
4.1. DATA RESPONDEN	11
RESPONDEN BERDASARKAN JENIS PELAYANAN	11
RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN	12
RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	12
RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN	14
4.2. DATA DUKUNG LAINNYA	15



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN SURVEI
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN II TAHUN 2026

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA KELAS I A

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

Nomor 4 Tahun 2023

Yogyakarta, 2 Juli 2026



Ketua PA Yogyakarta

Drs. Tubagus Masrur, S.H.
NIP. 196809061994031003

Ketua Tim

Drs. ABDUL ADHIM AT
NIP. 196712281994031004

BAB I

KUESIONER SURVEI

1.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN SURVEI

Dasar hukum dari pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023

1.2. KETENTUAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM, maka penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi pada **Pengadilan Agama Yogyakarta** dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut

1. Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada unit/satuan kerja yang melakukan pembangunan ZI
2. Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari unit/satuan kerja
3. Pertanyaan survei minimal mencakup aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan.
4. Pelaksanaan survei mandiri diutamakan memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survei;
5. Proses survei sesuai dengan kaidah statistik dan metodologi yang diakui;
6. Hasil SPAK dalam skala 4 (empat) menjadi nilai dari komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel"
7. Survei mandiri yang dilakukan oleh unit/satuan kerja wajib menyertakan analisa dan rencana tindak lanjut perbaikan layanan.
8. Laporan hasil survey dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

1.3. INDIKATOR SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Indikator survey persepsi Anti Korupsi terdiri dari 5 yaitu aspek diskriminasi pelayanan, kecurangan pelayanan, permintaan imbalan, pungutan liar (pungli), dan percaloan/perantara. Adapun interval persepsi dari 5 indikator tersebut antara 1 sampai dengan 4 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan bahwa Bapak/Ibu semakin setuju bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik.

Berikut pernyataan yang membentuk 5 indikator persepsi Anti Korupsi:

1. Aspek tidak adanya diskriminasi;

Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

2. Aspek tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan;

Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dan lain-lain.

3. Aspek tidak ada penerimaan imbalan;

Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi dll, di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan, fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi dan hiburan/voucher belanja) di luar ketentuan.

4. Aspek tidak ada pungutan liar;

Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi.

5. Aspek Tidak ada Percaloan ;

Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktek percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit pelayanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

BAB II

METODOLOGI SURVEI

2.1. KRITERIA RESPONDEN

Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada **Pengadilan Agama Yogyakarta** dan penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari **Pengadilan Agama Yogyakarta**. Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah **Pengadilan Agama Yogyakarta**.

Berdasarkan Surat Edaran Plt. Ditjen Badilag Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tentang "Pemberlakuan Aplikasi E-Survey Simtalak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI". Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan 30 responden selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April s/d Juni 2026

2.2. METODOLOGI PENYUSUNAN SURVEY

a. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di **Pengadilan Agama Yogyakarta** pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan **Pengadilan Agama Yogyakarta** pada tanggal 1 April s/d 30 Juni 2026.

b. Penyusunan Jadwal

Jadwal survei dilaksanakan dari mulai April sampai dengan Juni 2026 dan dilakukan analisis hasil survei dalam bulan Juli 2026.

c. Pengumpulan data

Pengumpulan data responden dilakukan melalui aplikasi survey badilag (<https://survei.badilag.net/home/>) dan diperoleh sebanyak 159 responden.

Interval nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SPAK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	B	Baik
4	3,53-4,00	A	Sangat baik

2.3. METODOLOGI PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

PENGOLAHAN DATA

Metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Sejalan dengan pernyataan tersebut, dalam penelitian survei informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui online. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada pengertian survei sampel di mana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi (sampel) untuk mewakili seluruh populasi, minimal sampel 30 (tiga puluh) responden.

Pengisian kuesioner pada Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di lingkungan peradilan agama dilakukan melalui link <https://survei.badilag.net/home/>, pada link tersebut pengolahan data dilakukan secara otomatis dan hasil survey dapat diketahui secara real time. Pengolahan data responden disajikan dan dideskripsikan dalam bentuk table-tabel terdapat pada Bab IV data survey dan lampiran pada laporan ini.

ANALISIS DATA

Analisis data survei menggunakan analisis kuantitatif dengan menghitung jumlah keseluruhan jawaban responden pada masing-masing indikator dibandingkan dengan jumlah keseluruhan responden dikalikan jawaban maksimal. Hasil tersebut dikalikan dengan maksimal nilai pada interval 4,00. Adapun deskripsi perhitungannya sebagai berikut

$\sum X1$ = jumlah persepsi Indikator 1

n = jumlah data responden yang diolah

nilai maksimal persepsi (bobot) = 4

nilai maksimal survey (skala) = 4,00

$$\text{nilai survey } X1 = \frac{\sum X1}{n \times 4} \times 4,00$$

sebagai contoh: (lihat Bab IV pada data responden)

$$\text{nilai survey } X1 = \frac{617}{159 \times 4} \times 4,00 = 3,88$$

Sedangkan nilai survey persepsi anti korupsi merupakan rata-rata dari nilai survey tiap indikator.

Dengan rumus =

$$\text{AVERAGE (Nilai Survey } X1 : X5)$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

3.1. ANALISIS HASIL SURVEI

Hasil penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Yogyakarta pada Triwulan II Tahun 2026 **Periode April s/d Juni** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SPAK adalah **3,89 atau 97.25%**, jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2026 sebesar **3,85** mengalami kenaikan sebesar **(0,04)**.

Faktor kenaikan

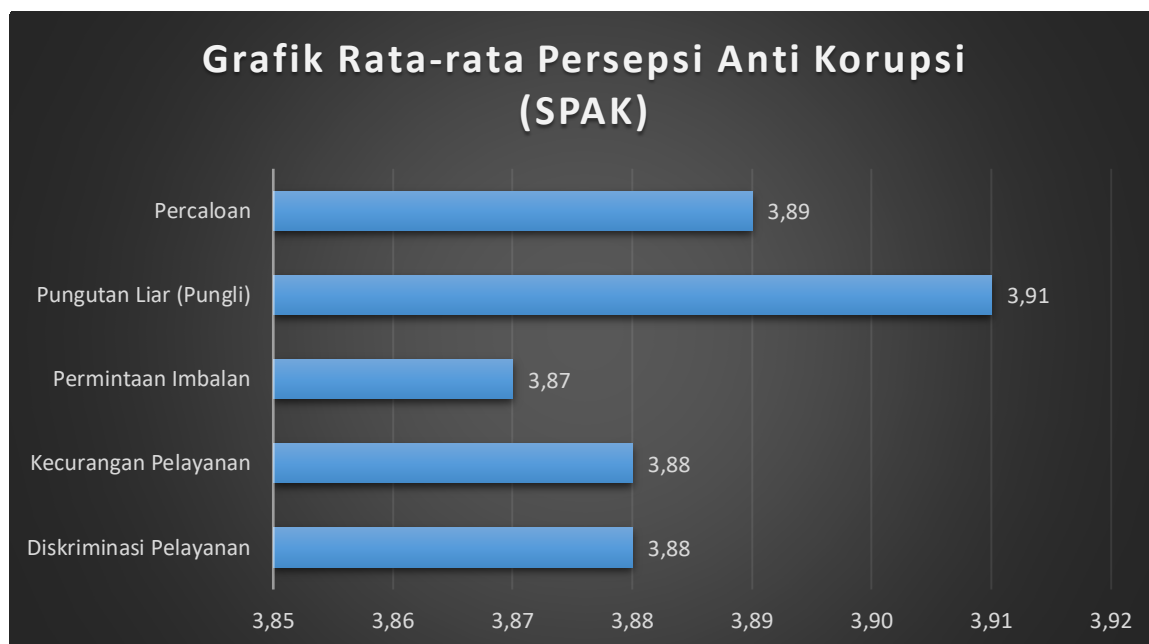
Berbagai indikator yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pemerintah yang bersih dan akuntabel, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Pada triwulan II tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar (0,04) dikarenakan adanya peningkatan persepsi terhadap kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja, yang didukung oleh upaya perbaikan pada aspek pelayanan, transparansi, serta peningkatan kualitas pelaksanaan tugas sesuai dengan indikator yang diukur dalam kuesioner.

Tujuan survei persepsi anti korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi. Ada dua hal penting yang menjadi sasaran survey ini yaitu, Pertama adalah terselenggaranya pelayanan public yang bersih, akuntabel dan transparan. Kedua adalah tercapainya perbaikan system, mekanisme dan prosedur pelayanan public sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan anti gratifikasi.

**TABEL 3.1 NILAI RATA-RATA INDIKATOR PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

No.	Indikator Persepsi Anti Korupsi	Nilai Unsur	Mutu
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3.88	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3.88	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3.87	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3.91	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3.89	Sangat Baik (A)
Rata-rata tertimbang		3,89	

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan, warna kuning paling rendah

**GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA INDIKATOR PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Berdasarkan **Tabel 3.1** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa dari 5 Indikator sudah baik, Aspek anti korupsi yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah unsur **Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini (3,89)** dan **Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini (3,91)** sedangkan unsur yang nilainya paling rendah yaitu unsur **Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku (3,87)**.

3.2. KESIMPULAN HASIL SURVEY

Berdasarkan hasil Analisa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada **Pengadilan Agama Yogyakarta** tahun 2026 pada periode bulan April s/d Juni 2026, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

TABEL 3.2 KESIMPULAN HASIL SURVEY

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai SPAK	3,89
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Indikator Terendah	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku (3,87)
4.	Indikator Tertinggi	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini (3,91)

Jika dilihat dari perkembangan tiap triwulannya, hasil olah data survey sudah termasuk kategori sangat baik. Oleh karena Pengadilan Agama Yogyakarta sudah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga perlu meningkatkan hasil survey persepsi anti korupsi dan persepsi kualitas pelayanan serta survei kepuasan masyarakat.

3.3. OPINI RESPONDEN

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan **Pengadilan Agama Yogyakarta** :

- Se jauh ini sistem pelayanan sudah sangat bagus, mohon di pertahankan dan/atau ditingkatkan.
- Pelayanan baik dan sangat kompeten. dan semoga lebih baik
- Semoga semakin baik Ruang tunggu diluar/ outdoor perlu ditambah
- Mohon lebih informatif untuk pelayanan via online terutama pada aplikasi Whatsapp

3.4. TINDAKLANJUT HASIL SURVEI

Berdasarkan 3.2. kesimpulan hasil survey, nilai terendah pada unsur tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku (3,87) kategori sangat baik, secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat memuaskan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kepercayaan dan kepuasan responden melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan budaya integritas, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan seluruh layanan diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dan bebas dari segala bentuk gratifikasi maupun pungutan di luar ketentuan yang berlaku.

Evaluasi survey juga membahas tindaklanjut terhadap masukan dan saran masyarakat pencari keadilan, antara lain:

- a. Sistem registrasi ulang di lokasi. Nomor antrean yang dipanggil 3 kali tanpa kehadiran akan otomatis diloncat sebanyak 3 perkara demi kelancaran sidang.
- b. Memaksimalkan fitur pada sistem yang ada, setelah data saksi divalidasi petugas, sistem akan langsung terkoneksi (real-time) ke SIPP.
- c. Menambahkan tugas Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membantu menjaga ketertiban jalannya persidangan, seiring beralihnya panggilan manual ke panggilan elektronik (e-Summons).
- d. Menambahkan informasi keterangan agenda sidang pada layar display antrean agar jalannya persidangan dapat dipantau masyarakat secara real-time.
- e. Mewajibkan dan memonitor seluruh petugas PTSP untuk menerapkan budaya pelayanan prima 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) secara konsisten.

BAB IV

DATA SURVEI

4.1. DATA RESPONDEN

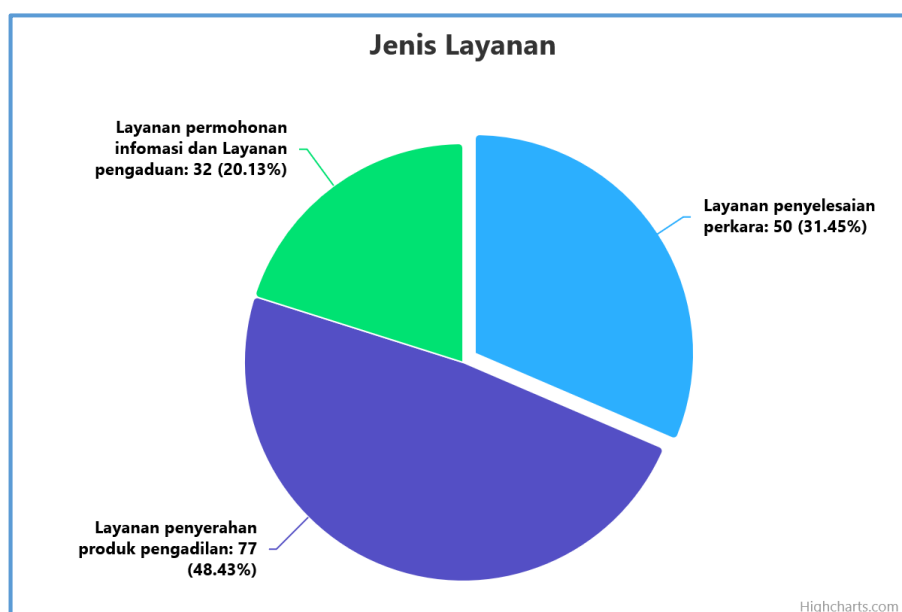
RESPONDEN BERDASARKAN JENIS PELAYANAN

Karakteristik responden pada survey periode bulan April s/d Juni 2026, sebagian besar responden melakukan layanan penyerahan produk yaitu sebesar 48,43 % dari seluruh total 159 responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

**TABEL 4.1 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
1	Layanan penyelesaian perkara	50	31,45 %
2	Layanan penyerahan produk pengadilan	77	48,43 %
3	Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan	32	20,13 %
Total		159	100 %

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

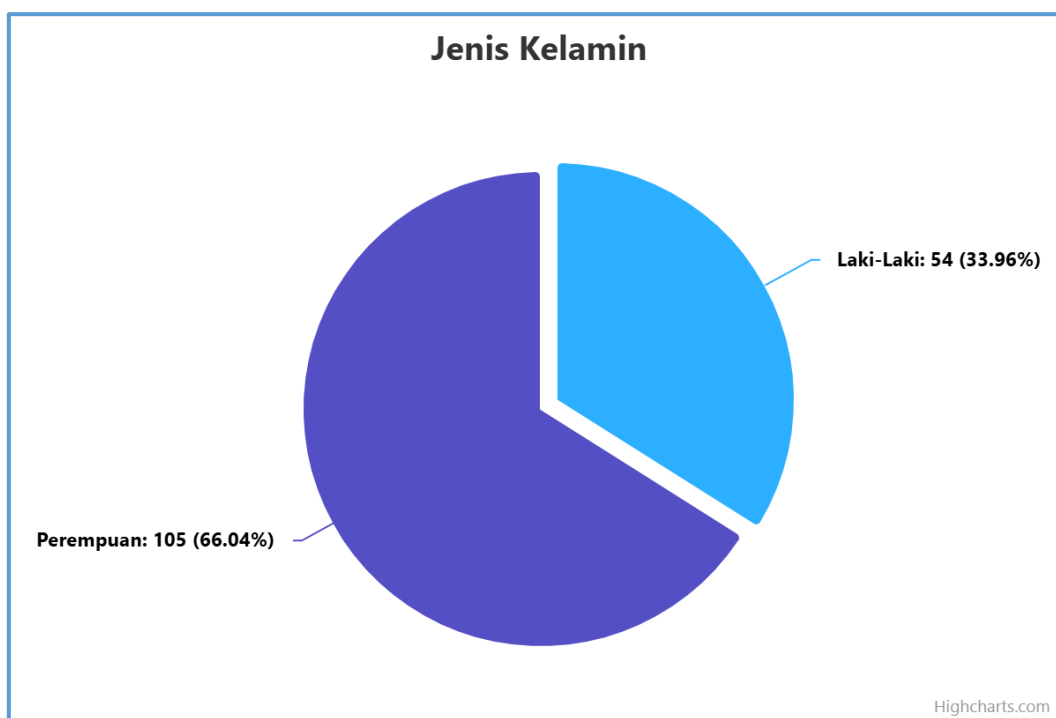


RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Karakteristik responden pada survey periode bulan April s/d Juni 2026, sebagian besar responden berjenis kelamin Perempuan yaitu sebesar 66,04 % dari seluruh total 159 responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada **Tabel 4.2**

**TABEL 4.2 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

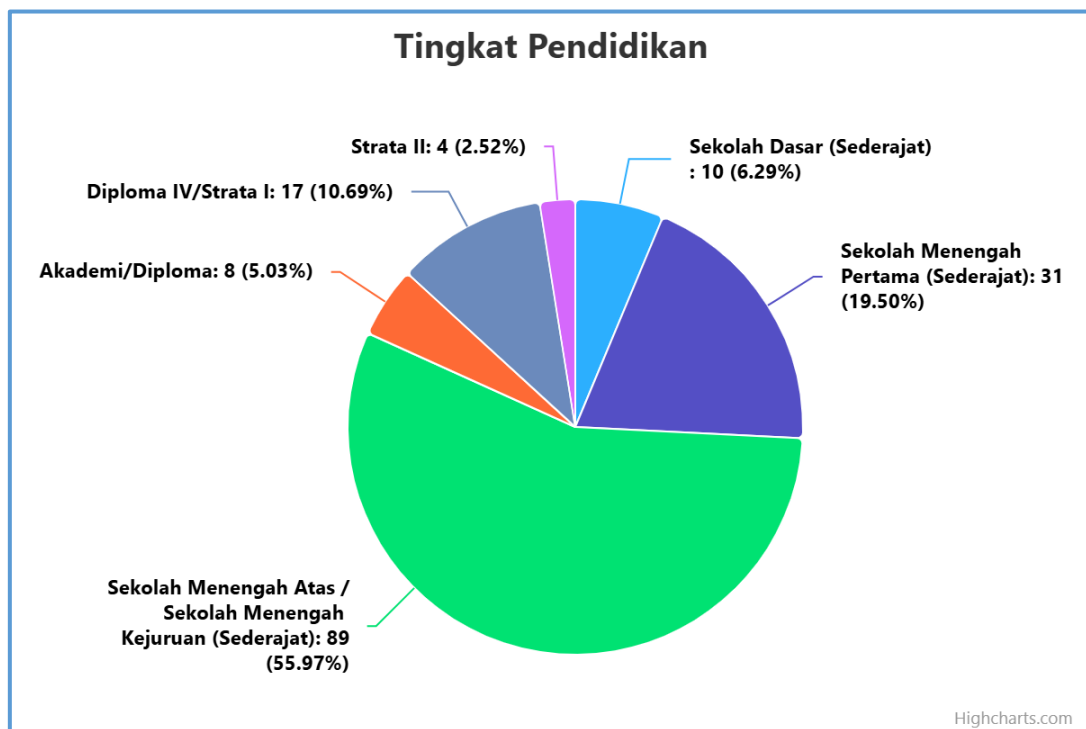
No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
1	Perempuan	105	66,04 %
2	Laki Laki	54	33,96 %
Total		159	100%

**RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

Karakteristik responden pada survey periode bulan April s/d Juni 2026, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar **55,97 %** dari seluruh total **159 responden**. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.3

**TABEL 4.3 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar (Sederajat)	10	6,29%
2	Sekolah Menengah Pertama (Sederajat)	31	19,50 %
3	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	89	55,97 %
4	Akademi/Diploma	8	5,03 %
5	Diploma IV/Strata I	17	10,69 %
6	Strata II	4	2,52 %
Total		159	100%



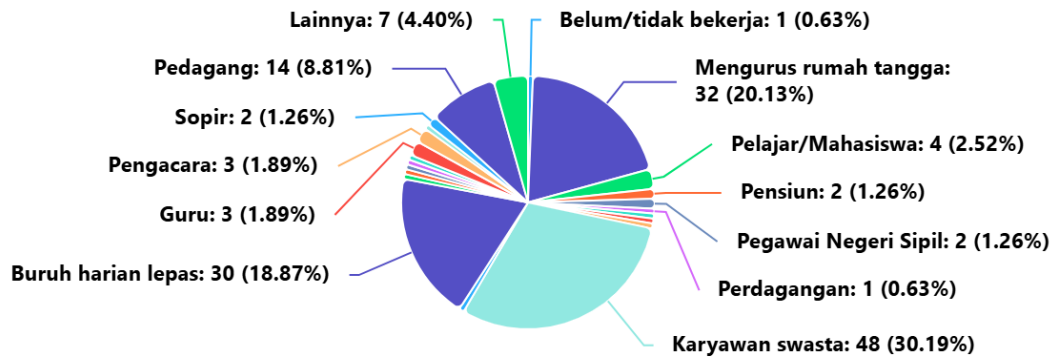
RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN

Karakteristik responden pada survey periode bulan April s/d Juni tahun 2026, sebagian besar responden memiliki pekerjaan Karyawan Swasta sebesar **30,19 %** dari seluruh total **159 responden**. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.3

**TABEL 4. PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
BERDASARKAN PEKERJAAN**

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum/tidak bekerja	1	0,63 %
2	Mengurus rumah tangga	32	20,13 %
3	Pelajar/Mahasiswa	4	2,52 %
4	Pensiun	2	1,26 %
5	Pegawai Negeri Sipil	2	1,26 %
6	Perdagangan	1	0,63 %
7	Petani/pekebun	1	0,63 %
8	Nelayan/perikanan	1	0,56 %
9	Industri	1	0,63 %
10	Karyawan swasta	48	30,19 %
11	Karyawan Honorer	1	0,63 %
12	Buruh harian lepas	30	18,87%
13	Buruh tani / perkebunan	1	0,63 %
14	Buruh nelayan / perikanan	1	0,63 %
15	Pembantu rumah tangga	1	0,63 %
16	Penata busana	1	0,63 %
17	Seniman	1	0,63 %
18	Guru	3	1,89 %
19	Pengacara	3	1,89 %
20	Perawat	1	0,63 %
21	Sopir	2	1,26 %
22	Pedagang	14	8,81 %
23	Lainnya	7	4,40 %
Total		159	100%

Pekerjaan



Highcharts.com

Karakteristik responden yang mewakili pengunjung **Pengadilan Agama Yogyakarta** secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, **Pengadilan Agama Yogyakarta** dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

4.2. DATA DUKUNG LAINNYA

Laporan survey persepsi Anti Korupsi (SPAK) triwulan II Tahun 2026 menurut hasil survey badilag sebagai berikut:

DATA UNSURSURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI				
Periode Triwulan 2 Tahun 2026				
Total Responden : 159 INDEKS : 3.89				
Copy CSV Excel Print				
NO	PERSEPSI ANTI KORUPSI	NILAI	MUTU	
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3.88	Sangat Baik (A)	
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3.88	Sangat Baik (A)	
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3.87	Sangat Baik (A)	
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3.91	Sangat Baik (A)	
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini	3.89	Sangat Baik (A)	

Showing 1 to 5 of 5 entries